

RENCANA KERJA

**KECAMATAN MOJOSARI
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2026**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN MOJOSARI
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Mojosari Tahun 2026 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Juli 2025

Pt. CAMAT MOJOSARI



YULIUS BAKHTIAR, S.P., M.M.

Pembina

NIP. 19690729 199403 1 006

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 3

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU9

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... 9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 15

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 17

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 18

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 24

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....25

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 25

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah..... 25

3.3 Program dan Kegiatan..... 26

BAB IV.....30

BAB V PENUTUP34

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Rancangan Renja..... 34

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan..... 34

5.3 Rencana Tindak Lanjut 35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Kecamatan Mojosari merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026 Kabupaten Mojokerto yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto berdasarkan visi, misi, tujuan, dan strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Rencana Kerja Tahun 2026 Kecamatan Mojosari yang selanjutnya disingkat dengan Renja Kecamatan Mojosari adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Mojosari Tahun 2025-2029.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Rencana Kerja merupakan alat untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang pencapaian targetnya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Renja Perangkat Daerah disusun melalui tahapan sebagai berikut :

a. Persiapan penyusunan Renja SKPD

Tahapan persiapan penyusunan Renja antara lain pembentukan tim penyusun Renja, orientasi mengenai Renja, penyusunan agenda kerja, serta pengumpulan data dan informasi.

b. Penyusunan Renja SKPD

1. Tahap perumusan rancangan Renja

Perumusan Renja dilakukan melalui serangkaian kegiatan, yaitu pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan SKPD, mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, telaah terhadap rancangan akhir RKPD, perumusan tujuan dan sasaran, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, perumusan kegiatan prioritas, penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD, pembahasan forum SKPD, serta penyesuaian dokumen Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

2. Tahap penyajian Renja

Penyajian Renja dapat disusun menurut sistematika yang ada.

c. Pelaksanaan forum SKPD

Forum SKPD merupakan wadah penampungan dan penjangkaran aspirasi masyarakat dan dunia usaha (pemangku kepentingan), untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja SKPD.

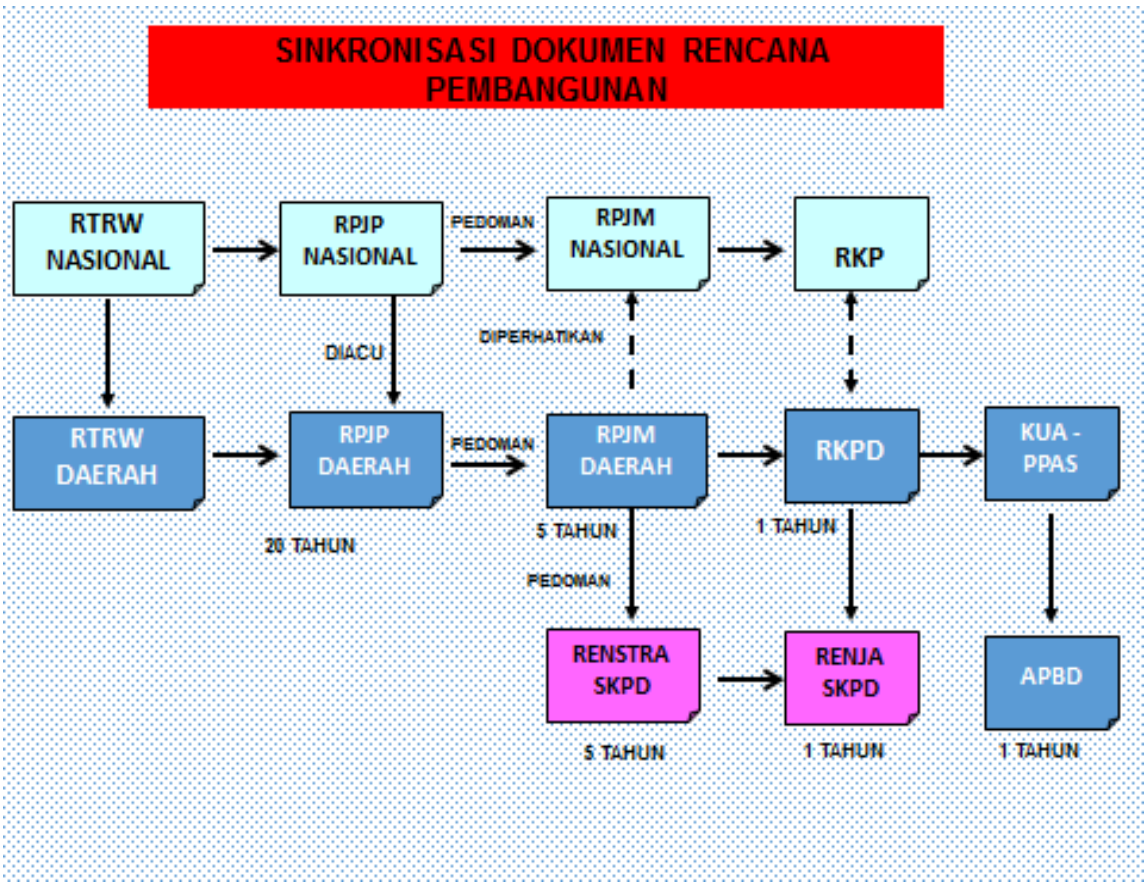
d. Penetapan Renja SKPD

Penetapan rancangan akhir Renja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran tersebut.

Keterkaitan antara Renja PD dengan Dokumen RKPD, Renstra PD, Renja K/L dan Renja Provinsi dapat dilihat pada bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen RKPD



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renja Kecamatan Mojosari yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan RKA Kecamatan Mojosari.

RKPD merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD. Kegiatan awal penyusunan Rancangan APBD dimulai dari penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kepala Daerah menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahunnya. Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

Berdasarkan KUA yang telah disepakati maka Pemerintah Daerah menyusun PPAS dengan tahapan sebagai berikut :

- a) Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;
- b) Menentukan urusan program untuk masing-masing urusan;
- c) Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.

Dari KUA dan PPAS yang telah disusun akan diperoleh nota kesepakatan yang akan menjadi dasar penyusunan RKA-SKPD. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) memuat tentang aktivitas dalam penyusunan APBD. RKA-SKPD ini dibuat oleh unit-unit kerja pemerintah sehingga sifatnya adalah usulan dengan menggunakan PPAS sebagai acuannya. Usulan-usulan ini akan dibahas dan dibuat penetapan oleh panitia anggaran yang dibentuk oleh Kepala Daerah dan DPRD, untuk selanjutnya dievaluasi dan diseleksi menjadi RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- 13) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 14) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
- 15) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 22) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 23) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 24) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;

- 25) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2025;
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
- 27) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
- 28) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021 Nomor 4)
- 29) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021 Nomor 1)
- 30) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029;
- 31) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
- 32) Keputusan Camat Mojosari tentang Penunjukan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto No. 188.4/10/416-310/2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penjabaran penyelenggaraan perencanaan pembangunan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, sehingga para pelaksana pembangunan daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah.

Adapun tujuannya adalah agar pembanguann di Kabupaten Mojokerto khususnya di Kecamatan Mojosari sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan dilakukan secara terukur, terarah dan terpadu secara konsisten, agar berhasil sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Kecamatan Mojosari ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mojosari. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renja ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Renja Perangkat Daerah serta keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Kecamatan Mojosari dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Sajian Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai

dengan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Sajian Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mojosari permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Berisikan Uraian mengenai:

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan akhir RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.
- d. Sajian Tabel TC-31 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

3.2 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

Pada Bab ini berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisi penjelasan mengenai: Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan
- Lokasi program/kegiatan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya
- Sajian Tabel TC 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bahwa dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Rencana Kerja Perangkat Daerah ini, kami mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Perangkat Daerah ini kami kerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam: “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.” Sedangkan untuk capaian Renstra Kecamatan Mojosari pada tahun 2025 pada umumnya tercapai dengan baik. Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2025 diuraikan sebagaimana tabel 2.1 berikut ini:

TABEL 2.1			
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024			
OPD/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI S/D DESEMBER (Rp)	%
KECAMATAN MOJOSARI	10.455.592.750	9.669.315.336	92,48%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.491.378.000	6.136.278.426	94,53%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.000.000	7.976.000	99,70%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	4.768.000	95,36%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.804.378.000	5.484.978.206	94,50%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	49.939.000	99,88%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.000	850.320	85,03%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.000.000	68.216.500	97,45%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	56.000.000	55.655.500	99,38%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	2.947.500	98,25%

Penyediaan Bahan/Material	60.000.000	57.869.500	96,45%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.000.000	33.510.000	98,56%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.000.000	65.485.550	72,76%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.000.000	178.775.550	99,32%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.000.000	75.727.000	94,66%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	29.746.800	99,16%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	19.833.000	99,17%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	25.800.000	23.846.800	92,43%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	25.800.000	23.846.800	92,43%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.703.414.750	3.290.406.490	88,85%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kauman	527.660.000	515.030.780	97,61%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kauman	215.754.750	189.617.000	87,89%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wonokusumo	483.711.200	457.111.320	94,50%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Wonokusumo	256.288.800	226.488.000	88,37%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sawahan	360.500.000	317.326.990	88,02%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sawahan	379.500.000	342.261.200	90,19%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mojosari	388.400.000	371.849.140	95,74%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mojosari	351.600.000	326.119.000	92,75%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sarirejo	360.500.000	241.863.210	67,09%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sarirejo	379.500.000	302.739.850	79,77%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	235.000.000	218.783.620	93,10%
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	27.000.000	25.935.000	96,06%
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	27.000.000	24.630.500	91,22%
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	55.000.000	53.092.300	96,53%
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	126.000.000	115.125.820	91,37%

Kegiatan review evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan telah direncanakan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Capaian Renstra Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun lalu pada umumnya dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dan disajikan pada hasil pencapaian kinerja atas Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan tahun lalu, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana dijabarkan dalam tabel 2.2 (T-C.29) sebagai berikut:

Tabel 2.2 (T.C 29 pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Mojosari

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78 (B)	78,9 (B)	81%	82,3 (A)	100,00%	81 (A)	82,3 (A)	100%
		Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	100,00%	1 Inovasi	1 Inovasi	100%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai Sesuai Target	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%
		Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	100,00%	21 Laporan	21 Laporan	100%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	92%	89,7%	91%	92,48%	101%	92 %	92%	100%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang / Bulan	40 Orang/Bulan	40 Orang	40 Orang	100,00%	40 Orang / Bulan	40 Orang / Bulan	100%
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	85,75	78,73	85	-	100,54%	85,75	85,75	100%
7.01.01.2.05.02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	-	-	-	100%
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	-	-	-	100%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	84,00%	100%	83%	83%	100,00%	84%	84%	100%

7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 paket	1 Paket	1 Paket	100,00%	1 Paket	1 Paket	100%
-----------------	--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	------

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	N/A	2 paket	1 Paket	1 Paket	100,00%	N/A	N/A	100%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100,00%	12 Paket	12 Paket	100%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100,00%	1 Paket	1 Paket	100%
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 paket	1 Paket	1 Paket	100,00%	1 Paket	1 Paket	100%
7.01.01.2.06.08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	12 Laporan	100%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	100%	100%	83%	100%	100,00%	100%	1	100%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	12 Laporan	100%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	12 Laporan	100%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	84%	82%	83%	83%	100,00%	84%	84%	100%
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	N/A	1 Unit	1 Unit	100,00%	2 Unit	2 Unit	100%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	N/A	2 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	10 Unit	10 Unit	100%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100,00%	2 Unit	2 Unit	100%
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	N/A	6 Unit	10 Unit	10 Unit	100,00%	N/A	N/A	100%
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	N/A	550 Pelayanan	550 Pelayanan	550 Pelayanan	100,00%	N/A	N/A	100%
		Persentase Aduan Masyarakat yang telah Ditindaklanjuti	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100,00%	6 Laporan	6 Laporan	100%
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	N/A	21 Fasilitasi	24 Fasilitasi	24 Fasilitasi	100,00%	N/A	N/A	100%
		Jumlah laporan koordinasi	4 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	4 Laporan	4 Laporan	100%
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, maka kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan di Kabupaten Mojokerto, sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan didukung sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Untuk mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang telah disesuaikan dengan capain indikator Kepala Daerah pada Misi 1 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Mojosari

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1.	Peningkatan Kinerja Layanan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah kabupaten diperlukan suatu tolak ukur kinerja. Tolak ukur kinerja ini didapat dari suatu penilaian yang sistimatik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Renstra Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto berdasarkan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 2.4 (T-C.30) sebagaimana berikut dibawah ini :

Tabel 2.4 (T-C. 30 Pada Lampiran Permendagri 2017)
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan
Mojosari Kabupaten Mojokerto

NO	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
				(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	IKM Kecamatan	-	-	88,5	89	90	90,50	88,75	-	90	90,50	-

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting penyelenggaraan dan fungsi Kecamatan Mojosari diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut :

a. Kondisi Internal

Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek : Perjanjian, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan , Pengawasan, Fasilitas, Penetapan, Penyelenggaraan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Kondisi internal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Mojosari

- Faktor Kekuatan Organisasi

1. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan , tugas pokok, fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto.
2. Aparat Kantor Kecamatan Mojosari bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3. Pola kerja di Kantor kecamatan Mojosari yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas pada Kantor Kecamatan Mojosari;
6. Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang memadai.

- Faktor Kelemahan Organisasi

1. Jumlah staf yang kurang memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas yang semakin terbatas :
2. Belum optimalnya kualitas sumber daya pegawai;
3. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja.
4. Belum tersedianya data kegiatan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan.

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis karena berada pada lingkungan eksternal organisasi, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Mojosari namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi.

Dua faktor dari lingkungan eksternal organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi antara lain :

- Faktor Peluang Organisasi
 1. Tersedianya potensi industri, UKM sumber daya alam, pertanian peternakan serta pariwisata;
 2. Tingginya peluang pasar;
 3. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf kecamatan sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
 4. Semakin tingginya partisipasi Masyarakat terhadap pembangunan.
- Faktor Tantangan Organisasi
 1. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana;
 2. Luasnya wilayah yang harus dijangkau dalam pelayanan;
 3. Kurang adanya perhatian pada pentingnya informasi yang terdapat pada masyarakat;
 4. Tuntutan masyarakat akan kecepatan sebuah pelayanan;
 5. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
 6. Infrastruktur jalan maupun drainase di tingkat Kecamatan maupun desa perlu diperbaiki;
 7. Sarana prasarana untuk fasilitas umum seperti sarana olah raga untuk masyarakat kurang;
 8. Peningkatan Kinerja melalui Inovasi dan Penerapan E-Office.

Dengan adanya permasalahan dan hambatan yang ada, dan melihat kondisi masyarakat Kecamatan Mojosari yang heterogen maka ini merupakan peluang dan tantangan bagi OPD Kecamatan Mojosari untuk dapat meningkatkan pelayanan publik secara maksimal di tahun-tahun berikutnya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam membangun kemandirian

ekonomi dan sosial budaya yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sinergitas program dengan Pemerintah Pusat. Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui mekanisme/ tahapan yang diawali dari Musrenbang Tingkat kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip yakni partisipatif, kesinambungan dan keseluruhan (Holistik)

Restrukturisasi Program/Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selengkapnya sebagaimana tabel 2.5 (T-C 31) berikut :

Tabel 2.5 (T-C. 31 Dalam Permendagri 2017)
Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026
Kabupaten Mojokerto

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kec. Mojosari	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76%	7.733.139.500	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kec. Mojosari	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76%	7.733.139.500	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Mojosari	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kecamatan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu	100%	20.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Mojosari	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kecamatan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu	100%	20.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Mojosari	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun	3 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Mojosari	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun	3 Dokumen	10.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Mojosari	Jumlah laporan kinerja yang dapat tersusun	12 Laporan	10.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Mojosari	Jumlah laporan kinerja yang dapat tersusun	12 Laporan	10.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Mojosari	Jumlah laporan keuangan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu	100%	6.561.139.500	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Mojosari	Jumlah laporan keuangan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu	100%	6.561.139.500	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Kec. Mojosari	Jumlah waktu pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	6.561.139.500	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Kec. Mojosari	Jumlah waktu pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	6.561.139.500	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Mojosari	IP ASN Perangkat Daerah	85	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Mojosari	IP ASN Perangkat Daerah	85	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Mojosari	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	45 Stel	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Mojosari	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	45 Stel	0	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Mojosari	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	43 Orang	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Mojosari	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	43 Orang	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Mojosari	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	100%	440.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Mojosari	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	100%	440.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Mojosari	Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	60.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /	Kec. Mojosari	Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	60.000.000	

						Penerangan Bangunan Kantor					
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Mojosari	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	125.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Mojosari	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	125.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Mojosari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	80.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Mojosari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	80.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Mojosari	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	40.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Mojosari	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	40.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Mojosari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 paket	10.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Mojosari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 paket	10.000.000	
	Penyediaan Bahan / Material	Kec. Mojosari	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 paket	80.000.000	Penyediaan Bahan / Material	Kec. Mojosari	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 paket	80.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Mojosari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	45.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Mojosari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	45.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Mojosari	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat dicukupi	85%	107.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Mojosari	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat dicukupi	85%	107.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Mojosari	Jumlah Paket Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 Unit	107.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Mojosari	Jumlah Paket Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 Unit	107.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Mojosari	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	100%	260.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Mojosari	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	100%	260.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Mojosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	90.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Mojosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	90.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Mojosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	170.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Mojosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	170.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Mojosari	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	345.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Mojosari	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	345.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Mojosari	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	80.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Mojosari	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	80.000.000	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Mojosari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	160.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Mojosari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	160.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Mojosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	60.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Mojosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	60.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Mojosari	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20 Unit	45.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Mojosari	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20 Unit	45.000.000	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Mojosari	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	40.000.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Mojosari	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	40.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Mojosari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	25 Laporan	40.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Mojosari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	25 Laporan	40.000.000	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Mojosari	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat	100%	2.850.000.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Mojosari	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat	100%	2.850.000.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Mojosari	Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	13 Kegiatan	2.850.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Mojosari	Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	13 Kegiatan	2.850.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mojosari	Kec. Mojosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	 Unit	270.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mojosari	Kec. Mojosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	 Unit	270.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wonokusumo	Kec. Mojosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	 Unit	270.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wonokusumo	Kec. Mojosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	 Unit	270.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sarirejo	Kec. Mojosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	 Unit	270.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sarirejo	Kec. Mojosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	 Unit	270.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kauman	Kec. Mojosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	 Unit	270.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kauman	Kec. Mojosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	 Unit	270.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sawahan	Kec. Mojosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	 Unit	270.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sawahan	Kec. Mojosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	 Unit	270.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mojosari	Kec. Mojosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	300.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mojosari	Kec. Mojosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	300.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Wonokusumo	Kec. Mojosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	300.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Wonokusumo	Kec. Mojosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	300.000.000	

	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kauman	Kec. Mojosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	300.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kauman	Kec. Mojosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	300.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sarirejo	Kec. Mojosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	300.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sarirejo	Kec. Mojosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	300.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mojosari	Kec. Mojosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	300.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mojosari	Kec. Mojosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	300.000.000	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Mojosari	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan,	81%	300.000.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Mojosari	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan,	81%	300.000.000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Mojosari	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	45.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Mojosari	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	45.000.000	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Mojosari	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen	45.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Mojosari	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen	45.000.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Mojosari	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	60.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Mojosari	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	60.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Mojosari	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5 Dokumen	150.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Mojosari	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5 Dokumen	150.000.000	
	JUMLAH				10.923.139.500	JUMLAH				10.923.139.500	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan merupakan sebuah OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam hal pelayanan publik sehingga hampir semua kegiatan selalu berhubungan langsung kepada masyarakat baik melalui pembinaan pemerintah desa, Lembaga, organisasi maupun masyarakat untuk dapat mewujudkan visi dan misi kabupaten Mojokerto yang diemban oleh Kecamatan khususnya misi ke 3. Oleh sebab untuk menampung usulan dan kegiatan masyarakat yang ada dikecamatan Mojosari melalui kegiatan Musrenbangdes dan Musrenbang Kecamatan, hasil dari dua kegiatan tersebut hanya berupa fisik prasarana, yang bentuk kegiatannya tidak dilakukan oleh Kecamatan Mojosari secara langsung melainkan membantu untuk menampung dan menyampaikan kepada dinas terkait. Selengkapnya sebagaimana tabel 2.6 (T-C 32) berikut :

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Mojokerto

Nama OPD: Kecamatan Mojosari

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan arah kebijakan nasional untuk lebih meningkatkan pelayanan umum pada semua masyarakat di semua lapisan maka semua program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Mojosari ditujukan untuk Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah adalah penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 2025 – 2029, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Kecamatan Mojosari menetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu: Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan. Tujuan tersebut selaras dengan Misi I RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, yaitu: “Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mojosari, dalam hal ini Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat tercapai.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025 – 2029. Sasaran merupakan bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Mojosari menetapkan sasaran strategi “Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan”.

Adapun target kinerja dari tujuan dan sasaran Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto pada 2025-2029 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1.

Target Kinerja Dari Tujuan Dan Sasaran

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Peningkatan Kinerja Layanan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	89,00	90,00	90,50	91,00	91,25	91,75

3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Mojosari Tahun 2025 mengacu pada Tujuan Kecamatan Mojosari yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mojosari untuk 5 tahun mendatang yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik. Untuk itu Program dan kegiatan yang ada juga bertujuan untuk Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yaitu antara lain :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan indikatif:
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 6. Pemerintahan Bahan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- c. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel 3.2 (T-C. 33 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Perkiraan Maju Tahun 2027

Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Mojosari

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	RENCANA TAHUN 2025				PRAKIRAN RENCANA MAJU TAHUN 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kec. Mojosari	76	7.733.139.500	APBD	80	7.914.800.000
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	81,5	100%	20.000.000	81,5	100%	21.600.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Inovasi	3 Dokumen	10.000.000	2 Inovasi	3 Dokumen	10.800.000
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12 Laporan	10.000.000		12 Laporan	10.800.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah		100%	6.561.139.500		100%	6.692.300.000
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		40 Orang/Bulan	6.561.139.500		40 Orang/Bulan	6.692.300.000
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah		85	-		86	-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya		45 Stel			45 Stel	-
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		43 Orang			43 Orang	-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan		100%	440.000.000		100%	461.900.000

7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	60.000.000		1 Paket	63.000.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	125.000.000		1 Paket	131.200.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket	80.000.000		12 Paket	84.000.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	40.000.000		2 Paket	42.000.000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2 Dokumen	10.000.000		2 Dokumen	10.500.000
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		2 paket	80.000.000		2 paket	84.000.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	45.000.000		12 Laporan	47.200.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat dicukupi		100%	107.000.000		100%	112.300.000
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Paket Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		3 Unit	107.000.000		3 Unit	112.300.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan		100%	260.000.000		100%	264.500.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	90.000.000		12 Laporan	94.500.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	170.000.000		12 Laporan	170.000.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik		100%	345.000.000		100%	362.200.000

7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		8 Unit	80.000.000		8 Unit	84.000.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 Unit	160.000.000		3 Unit	168.000.000
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 Unit	60.000.000		3 Unit	63.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		20 Unit	45.000.000		20 Unit	47.200.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan		100%	40.000.000		100%	42.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan		960 Pelayanan			960 Pelayanan	-
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan		25 Laporan	40.000.000		25 Laporan	42.000.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat		100%	2.850.000.000		100%	2.992.500.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan		15 Kegiatan	2.850.000.000		15 Kegiatan	2.850.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mojosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		1 Unit	270.000.000		1 Unit	270.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wonokusumo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		1 Unit	270.000.000		1 Unit	270.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kauman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		1 Unit	270.000.000		1 Unit	270.000.000

7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sarirejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		1 Unit	270.000.000		1 Unit	270.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sawahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		1 Unit	270.000.000		1 Unit	270.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mojosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		5 Pokmas / Ormas	300.000.000		5 Pokmas / Ormas	300.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Wonokusumo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		5 Pokmas / Ormas	300.000.000		5 Pokmas / Ormas	300.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kauman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		5 Pokmas / Ormas	300.000.000		5 Pokmas / Ormas	300.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sarirejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		5 Pokmas / Ormas	300.000.000		5 Pokmas / Ormas	300.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mojosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		5 Pokmas / Ormas	300.000.000		5 Pokmas / Ormas	300.000.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti		100%	300.000.000		100%	315.000.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat		23 Dokumen	300.000.000		23 Dokumen	314.900.000
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		8 Dokumen	45.000.000		8 Dokumen	47.200.000
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		5 Dokumen	45.000.000		5 Dokumen	47.200.000

7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		5 Dokumen	60.000.000		5 Dokumen	63.000.000
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		5 Dokumen	150.000.000		5 Dokumen	157.500.000
				JUMLAH	10.923.139.500			11.264.300.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rangkaian rencana kerja diawali dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Di dalam rencana kerja mengemukakan secara eksplisit rencana kerja program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan. Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Rentsra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah di laksanakan. Di samping itu, Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja serta target kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, rencana yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan OPD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja dan target kinerja program pembangunan OPD.

Secara rinci, rumusan rencana program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto Tahun 2026, dapat diuraikan sebagaimana tabel 4.1. berikut ini:

Tabel 4.1
Matrik Program Dan Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2025
Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR KINERJA			LOKASI	APBD KAB Rp.	APBD PROV		USULAN APBN		
					OUTPUT	OUTCOME	TARGET			SKPD Terkait	PAGU (Rp)	KL	Rp.	D/TB/DAK
I	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		B		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76	Kec Mojosari	7.733.139.500	-	-	-	-	-
1.1	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	100%	Kec Mojosari	20.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kec Mojosari	10.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kec Mojosari	10.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Jumlah laporan keuangan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu	100%	Kec Mojosari	6.561.139.500	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		L	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		40 Orang/Bulan	Kec Mojosari	6.561.139.500	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		L	IP ASN Perangkat Daerah		60	Kec Mojosari	0	-	-	-	-	-
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya		40 Stel	Kec Mojosari						
	7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		L	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		40 Orang	Kec Mojosari		-	-	-	-	-
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		L	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan		100%	Kec Mojosari	440.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		L	Jumlah Jenis komponen instalasi Listrik / penerangan bangunn Kantor yang Disediakan : lampu TL, saklar, stopkontak dll		1 Paket	Kec Mojosari	60.000.000	-	-	-	-	-

	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		L	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : Laptop, PC, LCD, Printer dll		1 Paket	Kec Mojosari	125.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		L	Jumlah waktu pemenuhan logistik kantor		12 Paket	Kec Mojosari	80.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		L	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy		2 Paket	Kec Mojosari	40.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		L	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		2 Dokumen	Kec Mojosari	10.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material		L	Jumlah jenis ATK yang disediakan : kertas, tinta, ballpoint, map, dll		2 paket	Kec Mojosari	80.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		L	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas dalam daerah		12 Laporan	Kec Mojosari	45.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		L	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat dicukupi		100%	Kec Mojosari	107.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		L	Jumlah Paket Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		3 unit	Kec Mojosari	107.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		L	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai Kebutuhan		100%	Kec Mojosari	260.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		L	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 Laporan	Kec Mojosari	90.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		L	Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan		12 Laporan	Kec Mojosari	170.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		L	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik		100%	Kec Mojosari	345.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		L	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang, dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan selama 12 bulan		8 Unit	Kec Mojosari	80.000.000	-	-	-	-	-

	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		L	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 Unit	Kec Mojosari	160.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		L	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 Unit	Kec Mojosari	60.000.000	-	-	-	-	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		20 Unit	Kec Mojosari	45.000.000					
	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		L	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan			Kec Mojosari	40.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		L	Jumlah Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan		960 Pelayanan	Kec Mojosari	40.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		L	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan		25 Laporan	Kec Mojosari	40.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		L	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat			Kec Mojosari	2.850.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		L	Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan		13 Kegiatan	Kec Mojosari	2.850.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mojosari		L	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		1 Unit	Kec Mojosari	270.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wonokusumo		L	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		1 Unit	Kec Mojosari	270.000.000					
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sarirejo		L	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		1 Unit	Kec Mojosari	270.000.000					
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kauman		L	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		1 Unit	Kec Mojosari	270.000.000					
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sawahan		L	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		1 Unit	Kec Mojosari	270.000.000					

	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mojosari		L	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		5 Pokmas / Ormas	Kec Mojosari	300.000.000					
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Wonokusumo		L	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		5 Pokmas / Ormas	Kec Mojosari	300.000.000					
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kauman		L	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		5 Pokmas / Ormas	Kec Mojosari	300.000.000					
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sarirejo		L	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		5 Pokmas / Ormas	Kec Mojosari	300.000.000					
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mojosari		L	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		5 Pokmas / Ormas	Kec Mojosari	300.000.000					
	7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		L	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan		82%	Kec Mojosari	300.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		L	Jumlah dokumen fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat		12 fasilitasi	Kec Mojosari	300.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		L	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		8 Dokumen	Kec Mojosari	45.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		L	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		5 Dokumen	Kec Mojosari	45.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.04.2.01.02	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		L	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		5 Dokumen	Kec Mojosari	60.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.03.2.03.02	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		L	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		5 Dokumen	Kec Mojosari	150.000.000	-	-	-	-	-
	JUMLAH								10.923.139.500					

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Rancangan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Review Rencana Strategis Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Mojosari Tahun 2025 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut dilakukan guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Mojosari, baik dalam kerangka regulasi, antara kegiatan satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses koordinasi antar pelaku pembangunan dibawah lingkup Kecamatan Mojosari, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi, baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang ditingkat desa, Musrenbang Kecamatan ditingkat Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten ditingkat Kabupaten.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan telah terbitnya Permendagri Nomor 86 tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Di dalam Penyusunan rancangan awal Renja Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Kecamatan Mojosari Tahun 2025 Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Rencana Kerja Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen- dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten Mojokerto, RPJMD Kabupaten Mojokerto, RKPD Kabupaten Mojokerto dan Renstra Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
2. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
3. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
4. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Mojokerto, Juli 2025
Pt. CAMAT MOJOSARI

YULIUS BAKHTIAR, S.P., M.M.
Pembina
NIP. 19690729 199403 1 006